



PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI): SEJARAH, PERAN, DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI): HISTORY, ROLE, AND INFLUENCE IN INDONESIA

Alfi Ramadhan¹, Ahmad Izzuddin²

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Email: alfirama1945@gmail.com¹, ahmadizzuddin.official@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 24-03-2025

Revised : 26-03-2025

Accepted : 28-03-2025

Published : 30-03-2025

Abstract

The Indonesian National Party (PNI) is a political party that played an important role in the history of Indonesia's struggle for independence. PNI was founded by Soekarno in Bandung on July 4 1927, on the basis of nationalism and anti-cooperation towards the Dutch colonial government. The party plays an important role in raising national awareness and supporting the country's political independence. The PNI was disbanded in 1931, but continued to change, becoming part of the fusion of the Indonesian Democratic Party (PDI) and then becoming the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). In this article, we will discuss the history of the PNI, its functions, and influence on Indonesian political developments before and after independence. This research provides insight into the contribution of this party in building national identity and the Indonesian political system by looking at the PNI's journey.

Keywords: *Indonesian National Party (PNI), Soekarno, political history*

Abstrak

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah salah satu partai politik yang memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. PNI didirikan oleh Soekarno di Bandung pada 4 Juli 1927, dengan dasar nasionalisme dan anti-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Partai ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran nasional dan mendukung kemandirian politik negara. PNI sempat dibubarkan pada 1931, tetapi terus berubah, menjadi bagian dari fusi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan kemudian menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam artikel ini, kami akan membahas sejarah PNI, fungsinya, dan pengaruh terhadap perkembangan politik Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kontribusi partai ini dalam membangun identitas nasional dan sistem politik Indonesia dengan melihat perjalanan PNI.

Kata Kunci: *Partai Nasional Indonesia (PNI), Soekarno, sejarah politik*

PENDAHULUAN

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik dengan sejarah panjang yang terlibat dalam persaingan kekuasaan di Indonesia. PNI, yang didirikan pertama kali oleh Sukarno pada Juli 1927, sangat membantu menumbuhkan kesadaran nasionalisme masyarakat Indonesia. PNI menjadi salah satu partai massa terbesar dalam sejarah politik Indonesia dan menarik banyak simpati masyarakat.

Sekitar tahun 1926, Sukarno muda bersekolah di Technische Hogeschool Bandung. Di sana dia menjadi anggota aktif Algemeene Studieclub, sebuah perkumpulan mahasiswa yang



terinspirasi oleh Indonesische Studie Club yang diprakarsai oleh Dr. Soetomo. Sukarno aktif mengikuti berbagai pertemuan dan perkembangan politik di Hindia-Belanda bersama teman-temannya (Van Niel, Robert., 1984). Dalam hal ini, dia memberi perhatian khusus pada bagaimana Sarekat Islam (SI), organisasi terbesar di Hindia-Belanda pada saat itu, berkembang. Organisasi ini berpecah menjadi dua kelompok setelah masuknya paham komunis, sehingga inti gerakan nasional yang kuat hilang (McVey, Ruth T., 1965).

Akibatnya, Sukarno merasa perlu sebuah kekuatan politik yang dapat mewakili perjuangan rakyat untuk kemerdekaan. Kemudian, pada 4 Juli 1927, Sukarno mengingat dalam autobiografinya, "...dengan dukungan dari enam orang kawan dari Algemeene Studieclub, aku mendirikan P.N.I. Partai Nasional Indonesia...". Dengan Sukarno sebagai ketua dewan pengurus umum dan Iskaq Tjokrohadisurjo sebagai sekretaris-bendahara, PNI secara resmi didirikan (Adams, Cindy, 2018).

Di bawah pimpinan Sukarno, PNI mengalami kemajuan yang cukup cepat. Jumlah anggota PNI mencapai 2.787 orang pada akhir 1928, dan PNI memiliki cabang di berbagai tempat, seperti Bandung, Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makassar, dan Manado (Suhartono, 1994). Selain hasil perjuangan para anggota, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh Sukarno, yang dengan kemampuan orasinya berhasil menarik simpati dari banyak orang. PNI telah menyelenggarakan kongres pada dua kesempatan. Kongres pertama diselenggarakan di Surabaya pada Mei 1928, dan kongres kedua diselenggarakan di Yogyakarta pada Mei 1929.

Sejak kongres kedua ini, partai yang didirikan oleh Sukarno mulai mengalami perpecahan. Merasa Gubernur Jenderal Andries C.D. de Graaff (berkuasa 1926–1931) kooperatif dan tidak terlalu keras terhadap nasionalisme, Sukarno mulai menunjukkan sikap radikal menuntut kemerdekaan, yang kemudian menarik perhatian pemerintah kolonial. Sejak saat itu, polisi Hindia-Belanda mulai mengawasi dan membatasi semua tindakan dan pergerakan PNI. Ini mencapai puncaknya pada tahun 1930 ketika para petinggi PNI, termasuk Soekarno, ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh pemerintah kolonial. Pada 11 November 1930, PNI secara resmi dibubarkan.

PNI resmi terbentuk kembali pada 29 Januari 1946, dengan S. Mangoensarkoro sebagai ketua. PNI dibentuk setelah Serikat Rakjat Indonesia (Serindo) berdiri pada November 1945 dan memutuskan untuk bergabung dengan beberapa partai lain dengan prinsip dan tujuan yang sama. Ini termasuk PNI Pati dan Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat, PNI Palembang dan Sulawesi, Partai Republik Indonesia (PRI), dan partai kecil lainnya. Mereka mencapai konsensus untuk membentuk partai baru yang dikenal sebagai PNI (Rocamora, J. Eliseo, 1970).

PNI mendapat banyak dukungan dari berbagai bagian masyarakat. Ini salah satunya karena PNI memiliki nama Sukarno di dalamnya. Dukungan ini membuat PNI cepat menjadi partai besar. PNI berhasil menyelenggarakan kongres nasional setidaknya empat kali selama pemerintahan Mangoensarkoro. Pada tahun 1950, Sidik Djojokusarto secara resmi menjabat sebagai pemimpin PNI (1950–1955). Namun, beberapa anggota menolak, yang mengakibatkan pecahnya PNI menjadi dua partai. Mereka yang menentang Sidik kemudian berpecah dan membentuk PNI Merdeka. Kemudian, itu berganti nama menjadi Partai Rakyat Nasional (PRN) (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1951).



PNI berhasil memperoleh posisi penting dalam kabinet di bawah kepemimpinan Sidik. Ini terbukti dengan terpilihnya Suwiryo sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman dan Wilopo sebagai Perdana Menteri dalam kabinet yang menggantikannya. PNI terus berkembang ketika mereka memenangkan pemilu 1945 dengan 22,3% suara pada 1955, memberikan 57 kursi dari 257 kursi di parlemen. Namun, Sidik Djojokusarto meninggal pada tahun yang sama setelah PNI menang. Suwiryo kemudian mengambil alih kepemimpinan PNI dari tahun 1956 hingga 1960 setelah menang dengan 2655 suara di Kongres PNI di Semarang pada 30 Juli 1956. Kemudian pada tahun 1958, terjadi kekacauan lagi di dalam organisasi; sayap kiri memisahkan diri pada Juli 1958 dan membentuk Partindo (Lev, Daniel S., (2009).

Pada kongres partai kesembilan tahun 1960, pemilihan ulang untuk ketua PNI diadakan, dan Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai ketua baru. Meletusnya serangan G 30/S pada tahun 1965 adalah salah satu peristiwa penting yang mewarnai masa kepemimpinan Ali S. Setelah peristiwa 1965, partai politik yang dianggap memiliki hubungan dengan Komunitas Komunis dibersihkan secara menyeluruh. PNI menjadi salah satu partai yang posisinya sangat terancam. Meskipun demikian, terjadi perpecahan di tubuh PNI pada saat yang sama, yang menghasilkan dualisme kepemimpinan: Ali Sastroamidjojo, yang mendukung kebijakan Nasakom Sukarno, dan Hardi, yang antikomunis. Perpecahan ini ternyata melindungi PNI dari pembersihan partai politik. Pada saat itu, jenderal Soeharto, yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi tersebut, tetap mempertahankan PNI karena ada kelompok yang anti- komunis.

Memasuki pemerintahan orde baru, pemerintah memilih Osa Maliki sebagai pemimpin PNI untuk mempertahankan kendalinya. Namun, Osa meninggal pada 1970 dan digantikan oleh Hadisubeno Sosrowedjojo. Kondisi PNI mulai menurun sejak saat itu. Pada tahun 1973, PNI dan beberapa partai lainnya digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia untuk membatasi jumlah partai politik dan melemahkan oposisi

PNI-Marhaenisme, yang didirikan pada Mei 2002 dengan Sukmawati Sukarnoputri sebagai pemimpin, didirikan setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto. Namun, partai tersebut gagal dalam proses verifikasi Pemilu 2004 dan tidak dapat mengikuti pemilihan 2009, 2014, dan 2019 (Setiawan, Bambang, dkk., 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan memeriksa berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen sejarah, dan arsip Partai Nasional Indonesia (PNI). Selain itu, analisis dilakukan dengan melihat peristiwa penting yang melibatkan PNI dari awal berdirinya hingga pertumbuhannya setelah kemerdekaan. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran, pengaruh, dan kontribusi PNI dalam sejarah politik Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran PNI dalam membangun nasionalisme dan sistem politik Indonesia dengan cara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya PNI

Setelah kegagalan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1926/1927, yang dianggap sebagai organisasi yang dilarang, terjadi kekacauan organisasi untuk



gerakan yang menentang kebijakan kolonial (radikal). Nasionalis percaya bahwa sebuah organisasi baru diperlukan untuk menyimpan aspirasi dan tujuan orang-orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, beberapa tokoh nasionalis, termasuk Soekarno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Iskaq Tjokrohadisurjo, Sartono, Boediarto Martoatmojo, Soenario, Anwari, dan Samsi Sastrowidagdo, berkumpul di Regengsweg No. 22, Bandung. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah untuk menciptakan sebuah partai politik yang radikal dan nasional yang akan menjadi wadah bagi mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Salah satu tokoh yang hadir, Tjipto Mangoenkoesoemo, tidak setuju dengan pembentukan partai politik karena pemberontakan Partai Komunis Indonesia baru terjadi satu tahun sebelumnya pada tahun 1926. Dia diasingkan ke Bandung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (Tirta, N. W. A. 1985). Namun demikian, pertemuan ini menyebabkan berdirinya sebuah partai politik atau organisasi politik yang dikenal sebagai PNI. Selain kedelapan tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, sepuluh orang menjadi pendiri PNI, dan dua orang yang dimaksud adalah Jan Tilaar dan Soedjadi, yang dianggap berjasa terhadap pembentukan PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan dengan semangat Marhaenisme, self-help, dan nonkooperatif untuk mencapai kemerdekaan.

Soedjadi memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan swasta karena PNI berbasis nonkooperatif. Nama awalnya, Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia dalam kongres pertamanya di Surabaya pada bulan Mei 1928, satu tahun kemudian (Ricklefs, M.C., (2007). Partai Nasional Indonesia memiliki struktur kepengurusan yang jelas, seperti organisasi nasional lainnya. Pada kepengurusan awal PNI, Soekarno yang paling populer menjabat sebagai ketua organisasi, dan Iskaq menjabat sebagai sekretaris dan bendahara. Partai Nasional Indonesia (PNI) berfungsi sebagai pemrakarsa organisasi politik nasionalis. Ini berbeda dengan Sarekat Islam (SI), yang merupakan organisasi keagamaan (Islamisme), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang merupakan organisasi komunis (Marxisme) (Sudiyo dan Santono, 1997). Oleh karena itu, PNI tidak membedakan agama atau pandangan politik anggotanya, menjadikannya lebih beragam.

PNI Pelopor Persatuan Nasional Indonesia

PNI didirikan sebagai hasil dari nasionalisme Indonesia murni yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia. Ini disebabkan fakta bahwa sebelum berdirinya PNI, belum ada partai nasionalisme Indonesia murni yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kepercayaan pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Ada perbedaan mendasar antara PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Indische Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker atau Dr. Setiabudi. Mereka berbeda dengan:

1. Nasionalisme atau kebangsaan yang dianut oleh NIP, juga dikenal sebagai Nederlan-dsch Indisch Partij, dan didasarkan pada "Indisch Nationalisme". Tanah air asli Indonesia, tetapi juga tanah air bagi orang-orang Indo atau peranakan Belanda, orang Indo peranakan Cina, dan orang lain yang mencintai Indo-nesia.
2. Nasionalisme atau kebangsaan yang dianut PNI berasal dari nasionalisme Indonesia Murni, dengan penduduk asli Indonesia yang disebut "Inlanders" atau "Bumiputera" oleh orang



Belanda. PNI memiliki keyakinan nasionalisme atau kebangsaan yang berakar pada kebudayaan Indonesia, dan mereka tidak menolak unsur-unsur kebudayaan asing yang mendukung kebangsaan Indonesia.

Daerah Priangan (Jawa Barat) merupakan pusat dan basis kegiatan PNI.

Para pendiri PNI adalah (Wahyu Iryana, 2022):

1. Ir. Sukarno atau Bung Karno
2. Ir. Anwari
3. Mr. Iskaq Cokrobadisuryo
4. Mr. Sartono
5. Mr. Sunario
6. Mr. Budiarto
7. Dr. Samsi
8. Suyadi (dari Dept. van Financien)

Lima dari semua pendiri PNI atau Partai Nasional Indonesia yang disebutkan di atas adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda. Mereka adalah Tuan Iskaq Cokrobadisuryo, Tuan Sartono, Tuan Sunario, Tuan Budiarto, dan Tuan Samsi. Ir. Sukarno, juga dikenal dengan panggilan akrabnya Bung Karno, adalah pemimpin dan tokoh PNI yang terkenal. Dia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan lulus dari Technische Hoge School (THS) Bandung. Ir. Soekarno terkenal karena keahliannya dalam berpidato.

PNI, atau Partai Nasional Indonesia, berkomitmen untuk mencapai kemerdekaan Indonesia karena percaya pada kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan luar. PNI tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mencapai Indonesia merdeka. PNI menolak berpartisipasi atau duduk di dewan yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda, seperti Volksraad atau Dewan Rakyat, dan Gemeenteraden (dewan-dewan kabupaten).

PNI, atau Partai Nasional Indonesia, berkomitmen untuk mencapai kemerdekaan Indonesia karena percaya pada kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan luar. PNI tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mencapai Indonesia merdeka. PNI menolak berpartisipasi atau duduk di dewan yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda, seperti Volksraad atau Dewan Rakyat, dan Gemeenteraden (dewan-dewan kabupaten).

Dalam bidang ekonomi, PNI berusaha memperbaiki nasib serta meningkatkan taraf hidup dan status ekonomi rakyat Indonesia, yang telah sangat terluka oleh pemerasan dan penjajahan Belanda. Untuk menghadapi keserakahan dan perlakuan pihak-pihak yang sewenang-wenang seperti rentenir dan lintah darat, partai ini mendorong usaha-usaha kerajinan atau industri kecil, dan mendirikan bank-bank nasional dan perkumpulan koperasi. Di bidang sosial, PNI berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional Indonesia dengan mendirikan sekolah swasta, latihan keterampilan, dan sebagainya.

Pada bulan Juli 1927, PNI mendirikan cabang di Yogyakarta di bawah pimpinan Suyudi. Pada bulan November 1927, cabang di Jakarta didirikan di bawah pimpinan Mr. Sartono. Pada bulan Desember 1927, Ruslan Wongsokusumo memimpin panitia dengan Ir. Anwari sebagai



sekertaris untuk mendirikan cabang PNI di Surabaya. PNI cabang Surabaya resmi didirikan pada 5 Februari 1928.

Empat pemimpin Partai Nasional Indonesia ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 September 1929 atas tuduhan merencanakan pemberontakan PNI pada awal tahun 1930. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuptaja, dan Supriadinata adalah empat tokoh utama. Mereka akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan Bandung menjatuhkan mereka hukuman penjara berdasarkan bukti yang ditemukan saat penggeledahan pada 24 Desember 1929."

Semangat dan jiwa persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang ditanamkan oleh PNI di bawah pimpinan Bung Karno terbukti berhasil dengan terbentuknya PPPKI, atau pemufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Semangat dan jiwa persatuan dan kesatuan nasional Indonesia ini juga tertanam dalam organisasi-organisasi wanita dan lainnya. Bahkan di dalam organisasi atau perkumpulan profesi atau serikat sekerja, hal itu dapat berdampak seperti:

1. Persatuan Motoris Indonesia, yang dibentuk oleh sopir dan sopir di Bandung.
2. Serikat Anak Kapal Indonesia, yang dibentuk oleh pelaut dan kelasi kapal di Tanjung Periuk (Jakarta).

Perjuangan PNI dan para pemimpinnya dilandasi oleh semangat persatuan dan jiwa kesatuan nasional Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh:

1. Organisasi pemuda yang menggerakkan Sumpah Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober;
2. Organisasi wanita Indonesia yang menggerakkan Kongres Perempuan Indonesia, yang pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928.

Peran PNI Dalam Pergerakan Kemerdekaan

PNI memainkan peran penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. PNI adalah partai politik yang didirikan dari nasionalisme murni. Itu tidak hanya menjadi wadah untuk pertempuran politik, tetapi juga menjadi pendorong utama berbagai gerakan untuk mempercepat proses kemerdekaan. PNI memainkan beberapa peran penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia: PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang paling awal dan paling berpengaruh di Indonesia. PNI menyebarkan ideologi nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. PNI juga melakukan propaganda dan aksi-aksi demonstrasi untuk menentang penjajahan Belanda.

1. PNI sebagai Organisasi Pergerakan Kemerdekaan yang Berpengaruh

Salah satu organisasi politik paling awal dan paling berpengaruh dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia adalah PNI. PNI didirikan pada 4 Juli 1927 untuk menyebarkan nasionalisme dan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. PNI aktif melakukan propaganda untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan memotivasi orang untuk menentang kolonialisme.

PNI melakukannya dengan melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan penjajahan Belanda yang menindas rakyat Indonesia. Penyuluhan dan propaganda dilakukan melalui media cetak, pidato di berbagai tempat, dan pertemuan rahasia. Dengan cara ini,



PNI berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kemerdekaan dan melawan kolonialisme.

2. PNI sebagai Penggagas Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)

Pada 28 Oktober 1928, PNI berkontribusi pada penciptaan Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, menurut Sumpah Pemuda, sebuah deklarasi nasionalisme.

Karena masyarakat Indonesia masih terbagi dalam berbagai kelompok etnis, suku, dan daerah sebelum Sumpah Pemuda, itu menjadi tonggak sejarah dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Semangat persatuan menjadi lebih kuat dengan Sumpah Pemuda, yang mengubah perjuangan kemerdekaan menjadi perjuangan nasional yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia, daripada hanya orang-orang di daerah tertentu.

3. PNI sebagai Inisiator Kongres Pemuda Kedua (27-28 Oktober 1928)

PNI tidak hanya berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda, tetapi juga menjadi salah satu pendiri Kongres Pemuda Kedua yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres ini adalah pertemuan antara berbagai kelompok pemuda nasionalis yang berbicara tentang kemerdekaan dan masalah kebangsaan.

Beberapa keputusan penting yang dibuat selama Kongres Pemuda Kedua merupakan bagian dari sejarah perjuangan Indonesia. Di antaranya adalah pembentukan Badan Musyawarah Kebangsaan (BMK), yang berfungsi sebagai platform untuk berkomunikasi antara organisasi pemuda nasionalis.

- a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), yang bertujuan untuk mendorong semangat nasionalisme Indonesia.
- b. Penetapan lagu "Indonesia Raya" sebagai lagu kebangsaan Indonesia, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan pertama kali dinyanyikan dalam kongres ini.
- c. Keputusan-keputusan ini memperkuat persatuan bangsa dan mempercepat kesadaran anti- penjajahan.

4. PNI sebagai Pelopor Persatuan Perjuangan (1937)

PNI menjadi salah satu pendiri Persatuan Perjuangan pada tahun 1937, sebuah koalisi dari berbagai partai nasionalis yang menuntut kemerdekaan penuh dari Belanda. Untuk mencapai kemerdekaan, Persatuan Perjuangan menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah boikot barang-barang Belanda sebagai bentuk penentangan terhadap kolonialisme ekonomi.

- a. Mengadakan pertemuan umum untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan menyebarkan semangat perjuangan nasional.
- b. Bekerja sama dengan organisasi nasionalis lainnya untuk memperkuat gerakan anti-Belanda.

Karena Belanda mulai kehilangan dukungan rakyat, Persatuan Perjuangan menjadi salah satu bentuk perlawanan politik yang semakin memperlemah posisi mereka di Indonesia..



5. PNI sebagai Anggota GAPI (1941)

PNI bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1941, sebuah koalisi partai komunis, nasionalis, dan agama yang memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda. GAPI memainkan peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan karena mereka menekan Belanda di dalam negeri dan melakukan diplomasi di tingkat internasional untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Selain itu, GAPI melakukan berbagai persiapan untuk Perang Dunia Kedua, terutama untuk mempersiapkan kedatangan Jepang ke Indonesia. GAPI bekerja untuk mempersatukan rakyat Indonesia agar dapat menghadapi perang global.

6. PNI dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)

PNI berkontribusi besar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta, dua tokoh utama PNI, berperan penting dalam membaca teks proklamasi yang menandai kemerdekaan Indonesia dari semua bentuk penjajahan.

Setelah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi nasionalis, termasuk PNI, Proklamasi Kemerdekaan merupakan momen puncak dari perjuangan panjang mereka. Setelah proklamasi, PNI juga berpartisipasi aktif dalam pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dan memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh tetap dapat dipertahankan.

7. PNI dalam Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949)

Belanda ingin kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi. PNI juga berpartisipasi dalam beberapa bagian penting dari Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949):

- a. Membangun pemerintahan Republik Indonesia, termasuk membuat konstitusi dan membangun lembaga negara yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang merdeka;
- b. Membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang merupakan kekuatan militer yang bertanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan dan menghadapi serangan militer Belanda.
- c. Melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, termasuk mendukung perjuangan gerilya di seluruh negara untuk menghentikan tentara Belanda.

KESIMPULAN

Nasionalis, termasuk Soekarno, mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan semangat Marhaenisme, self-help, dan sikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. PNI muncul sebagai tanggapan atas kegagalan pemberontakan PKI dan kebutuhan akan organisasi politik nasionalis yang bebas dari kekuatan bangsa.



PNI adalah organisasi politik nasionalis yang memainkan peran penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. PNI menyebarkan ideologi nasionalisme, memulai Sumpah Pemuda 1928, dan berpartisipasi dalam berbagai kongres dan pergerakan yang memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, PNI menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan mendukung peningkatan ekonomi dan pendidikan rakyat Indonesia.

PNI dan para pemimpinnya, terutama Soekarno, memainkan peran penting dalam banyak hal, mulai dari menentang kebijakan kolonial dan membangun organisasi pergerakan nasional hingga terlibat langsung dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan mempertahankan kemerdekaan selama Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949). PNI menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia karena berbagai kontribusinya.

SUMBER REFERENSI

- Adams, Cindy. (2018). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno. P.42
- Giebels, Lambert, (2001), *Sukarno Biografi 1901-1950*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. P.81
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar P.58
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, (1951). *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia. P.126
- Lev, Daniel S. (2009). *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*. Singapore: Equinox Publishing. P.181-182
- McVey, Ruth T., (1965). *The Rise of Indonesian Communism*. New York: Cornell University Press. P.170
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. P.378
- Rocamora, J. Eliseo. "The Partai Nasional Indonesia 1963-1965", dalam *Indonesia*, No. 10, October, 1970., p. 143-181.
- Sudiyo, Sudiyo dan Santono, Dalimun dan Nugroho, Agus dan Suwardi, Edy. (1997). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. p.76
- Tirta, N. W. A. (1985). *Mr. Sartono: Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. p.42
- Van Niel, Robert. (1984), *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. P.297
- Wahyu Iryana (2022) *Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia Dan Kiprah Kaum Santri Dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republic Indonesia*, Jakarta: Prenada. P.45-48